

4



AGRIBISNIS

Paradigma Baru
Pembangunan Ekonomi
Berbasis Pertanian



Bungaran Saragih

AGRIBISNIS:

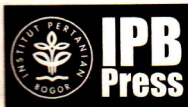
Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi
Berbasis Pertanian

Bungaran Saragih

Editor:

Rachmat Pambudy

Frans BM Dabukke



AGRIBISNIS:

Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi
Berbasis Pertanian

Bungaran Saragih

Editor:

Rachmat Pambody
Frans BM Dabukke

Editor Bahasa : Sandra Siti Syarifah

Desain Cover : Alita Wulan dini

Lay Out : Muhammad Yunus

Tommy Andreas

Andri Alamsyah

Proof Reader : Shinta Wulansari

Copyright © 2010

PT Penerbit IPB Press

Kampus IPB Taman Kencana Bogor

dan

Food and Agribusiness Center

Kumbang 31 Bogor

Edisi Ketiga

Cetakan Pertama: April 2010

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN: 978-979-493-243-8

- Daftar Isi -

Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	ix
Pengantar Editor	xi
Mukadimah	xv
Tentang Penulis	xxvii
Daftar Isi	xxix

BAGIAN PERTAMA

Agribisnis Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

1. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Menghadapi Abad Ke-21	1
2. Agribisnis Cara Baru Melihat Pertanian	21
3. Pembangunan Sektor Agribisnis dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia	33
4. Kebijakan Terpadu Pengembangan Agribisnis	73
5. Peningkatan Keunggulan Daya Saing Agribisnis Memasuki Era Persaingan	79

BAGIAN KEDUA

Strategi Industrialisasi Berbasis Agribisnis

6. Reformasi Strategi Industrialisasi dalam Rangka Percepatan Ekspor Sektor Agribisnis	99
7. Strategi Industrialisasi Neraca Pembayaran dan Pemulihan Ekonomi Indonesia	107
8. Pembangunan Sektor Agribisnis sebagai Strategi Industrialisasi yang Lebih Bersahabat dengan Lingkungan Hidup	115
9. Pilihan Strategi Industrialisasi Memasuki Milenium Ketiga yang Berpihak pada Penguatan Ekonomi Rakyat	121
10. Pemberdayaan Sektor Agribisnis sebagai Upaya Penanggulangan Krisis Pangan dan Devisa	129

BAGIAN KETIGA

Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas dan Sumberdaya

11. Pemberdayaan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura Keluar dari Jeratan Lingkaran Setan Sosial Ekonomi..... 147
12. Memberdayakan Peternak melalui Pengembangan Koperasi Agribisnis Peternakan 153
13. Pengembangan Agribisnis Berbasis Perikanan Menghadapi Era Perdagangan Bebas Abad 21..... 163
14. Karakteristik Agribisnis dan Implikasinya bagi Manajemen Agribisnis 171

BAGIAN KEEMPAT

Membangun Agribisnis Membangun Ekonomi Rakyat dan Daerah

15. Agribisnis sebagai Sektor Utama Ekonomi Rakyat: Prospek dan Pemberdayaannya..... 181
16. Pengembangan Agribisnis Berskala Kecil 189
17. Pembangunan Wilayah Jawa Barat yang Integratif Melalui Pengembangan Agribisnis 203
18. Pengembangan Agribisnis sebagai Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten Simalungun 209
19. Pengembangan Agribisnis di Daerah Transmigrasi 217
20. Pembinaan Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Ekonomi Perdesaan 223

BAGIAN KELIMA

Strategi Sistem dan Usaha Agribisnis Membangun Pertanian dan Perekonomian Nasional

21. Visi Misi Strategi dan Kebijakan dan Program Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis 231
22. Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Tahun 2000-2004 249
23. Kinerja Pembangunan Nasional dan Pertanian Tahun 2000-2004.. 257
24. Reshaping Global Agriculture Architecture for Eradicating Poverty and Hunger in the World..... 269

Epilog279

Profil Editor283

Daftar Pustaka285

Komoditas Unggulan

Pengembangan agribisnis di daerah transmigrasi harus mengacu pada keadaan nyata di lapangan. Salah satunya adalah adanya komoditas unggulan. Bagaimana pemahaman kita tentang komoditas unggulan ini? Bagaimana suatu komoditas bisa dijadikan unggulan, terutama bila dikaitkan dengan daerah transmigrasi? Lebih spesifik lagi bila dikaitkan dengan pengembangan agribisnis daerah transmigrasi. Hal ini lebih baik dibahas terlebih dahulu karena beberapa hal bisa dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu komoditas sebagai unggulan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) baru-baru ini telah menetapkan komoditas unggulan terutama dalam menghadapi era pasar bebas tahun 2020. Kriteria yang digunakan sangat sederhana, yakni berdasarkan pangsa dalam ekspor. Walaupun kriteria ini bisa dikritik tetapi kriteria itu juga memiliki dasar yang kuat. Pertama, pangsa yang besar dalam ekspor menunjukkan adanya keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas yang bersangkutan; terlepas dari apakah keunggulan tersebut didapat karena berbagai proteksi dan fasilitas. Kedua, komoditas tersebut dihasilkan dalam jumlah banyak di dalam negeri; terlepas dari apakah komoditas tersebut dihasilkan dengan pendekatan *foot loose industry* atau karena semata-mata dipacu dalam rezim substitusi impor dan promosi ekspor.

Apakah pendekatan KADIN ini bisa dipergunakan sebagai dasar penetapan komoditas unggulan daerah transmigrasi? Jawabnya dalam batas tertentu serta dengan penyesuaian konteks pendekatan tersebut bisa dipergunakan. Kalau konteks yang dipergunakan KADIN adalah sangat luas, mencakup dunia keseluruhan, maka untuk daerah transmigrasi konteksnya bisa dipersempit. Apakah hanya sebatas Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), Kabupaten, Provinsi, Regional, atau sampai tingkat nasional. Dengan perkataan lain, bila KADIN menetapkan komoditas unggulan berdasarkan perdagangan internasional maka untuk daerah transmigrasi cukup berdasarkan perdagangan wilayah

atau antarwilayah. Jadi pendekatan atau konteksnya adalah pembangunan wilayah.

Dalam pengertian pembangunan wilayah atau regional, komoditas unggulan diartikan sebagai komoditas basis. Pengertiannya sejajar dengan yang dimaksudkan KADIN yakni berdasarkan pangsaanya dalam ekspor. Dalam pengertian pembangunan wilayah, komoditas basis adalah komoditas yang dihasilkan secara berlebihan dalam pengertian lebih untuk digunakan oleh masyarakat dalam suatu wilayah tertentu sehingga kelebihan tersebut dapat dijual ke luar wilayah tersebut. Sebagai akibat upaya transfer ke luar wilayah tersebut maka terciptalah kegiatan-kegiatan pendukung yang dapat meningkatkan nilai tambah serta memperluas kesempatan kerja. Dalam bahasa pembangunan wilayah, dampak tersebut dikenal sebagai dampak pengganda (*multiplier effect*; dalam bentuk dampak pengganda nilai tambah atau *added value multiplier* dan dampak pengganda penyerapan tenaga kerja atau *employment multiplier*). Semakin besar dampak pengganda tersebut semakin besar pula peranan komoditas tersebut sebagai komoditas basis atau komoditas unggulan.

Komoditas apakah yang menjadi komoditas basis atau unggulan di daerah transmigrasi? Jawabannya senantiasa berubah secara dinamis; tergantung dari pola transmigrasi di daerah yang bersangkutan. Namun, secara umum, berdasarkan kajian-kajian sederhana yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa komoditas unggulan daerah transmigrasi pada tahap-tahap awal pengembangan (masih dalam tahap binaan) adalah tanaman pangan (padi dan palawija konvensional, sayur-sayuran) serta kambing dan ayam buras. Hal ini berlaku juga bagi transmigrasi pola PIR; hanya saja, setelah tanaman dalam PIR itu telah menghasilkan maka tanaman tersebut menjadi salah satu komoditas basis atau unggulan pula.

Adakah penjelasan di belakang hal tersebut? Ada, yaitu bahwa dalam tahap-tahap awal transmigran akan membutuhkan sumber pendapatan yang cepat direalisasikan; atau tidak menunggu terlalu lama. Disamping itu, oleh karena pada umumnya transmigran memiliki modal yang terbatas, maka tanaman atau ternak yang diusahakan juga adalah yang tidak membutuhkan modal besar (dalam pengertian transmigran, investasi di atas Rp 500.000 barangkali sudah dianggap besar). Jadi pilihan tanaman pangan, kambing dan ayam buras adalah pilihan yang tepat. Transmigran juga biasanya menyesuaikan dengan kondisi lahan atau polanya. Kalau pola lahan basah maka komoditas basisnya adalah padi dan palawija, sedangkan kalau lahan kering komoditasnya adalah

palawija lahan kering (jagung, ubi jalar, sayur-sayuran, dan sebagainya); di samping kambing dan ayam buras.

Di sini terlihat bahwa transmigran dalam mengambil keputusan ternyata cukup rasional. Transmigran juga bisa menata tanaman dan hewan yang diusahakan sesuai dengan mendesakinya kebutuhan; baik kebutuhan pangan (sumber karbohidrat, protein, dan sebagainya) atau nonpangan.

Perwilayahan Agribisnis dan Efisiensi

Setelah menetapkan komoditas basis atau unggulan daerah transmigrasi yang sesuai dengan keadaan di lapangan maka pendekatan selanjutnya adalah mengkaji dan menetapkan wilayah pengembangan agribisnis. Penetapan wilayah agribisnis ini pada dasarnya sama dengan penemuan wilayah unit desa dahulu yang diambil dari pemikiran Mosher. Sepanjang pengetahuan kita, Departemen Transmigrasi dan PPH sejak dulu sudah terbiasa dengan pendekatan ini. Bahkan dengan penataan jenjang wilayah dari SP ke SKP sampai WPP menunjukkan bahwa Departemen Transmigrasi dan PPH sudah terbiasa dengan pembangunan wilayah.

Namun demikian, penentuan wilayah unit desa dan perwilayahan agribisnis mengandung beberapa perbedaan: baik dalam pendekatan maupun dalam luas cakupan wilayah. Dalam perwilayahan agribisnis, pendekatannya adalah pendekatan sistem agribisnis yang terdiri dari subsistem produksi (*on-farm agribusiness*), subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*), subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*), dan subsistem layanan pendukung. Subsistem hulu dan hilir disebut juga sebagai agribisnis nonusahatani (*off-farm agribusiness*).

Dalam suatu perwilayahan agribisnis diharapkan sebagian besar dari subsistem tersebut terdapat dalam suatu wilayah tertentu dengan skala kegiatan yang layak secara finansial. Hal ini tentunya tergantung dari seberapa besar tingkat produksi yang dihasilkan dalam wilayah tersebut. Dalam konteks daerah transmigrasi, bisa saja suatu wilayah agribisnis meliputi suatu SKP serta daerah sekitarnya; atau pada tingkat yang lebih luas, WPP, atau bahkan beberapa kecamatan dalam satu Kabupaten. Yang penting, dalam hal ini, dapat diciptakan suatu perwilayahan agribisnis yang menjamin efisiensi pengembangan agribisnis suatu komoditas basis atau unggulan.

Pada dasarnya, skala yang ekonomis tersebut dapat dicapai dengan pengintegrasian secara vertikal maupun secara horizontal (diversifikasi).

Dalam hal ini ada tiga jalur yang dapat ditempuh; yakni: (i) jalur kemitraan dengan pemodal kuat atau usaha besar baik dalam bentuk PIR, atau yang semacamnya; (ii) jalur koperasi; dan (iii) jalur pasar bebas atau diberikan⁽⁶²⁾ kepada kekuatan atau mekanisme pasar yang diharapkan bisa berfungsi secara efisien. Pada dasarnya pendekatan tersebut sama yakni suatu upaya pengintegrasian subsistem hulu dan hilir (*off-farm agribusiness*) dengan subsistem produksi (*on-farm agribusiness*) sehingga membentuk jaringan bisnis yang terpadu, efisien dan menguntungkan bagi warga transmigran yang pada umumnya menguasai subsistem produksi (*on-farm agribusiness*). Beberapa kegiatan subsistem layanan pendukung bahkan bisa dipadukan pula seperti fasilitas perkreditan dan penyediaan informasi.

Walaupun begitu, terdapat perbedaan yang mendasar dari ketiga pola tersebut dalam pengertian bahwa di satu pihak, tidak semua komoditas dapat ditangani lewat jalur kemitraan dan, di pihak lain, ada komoditas yang lebih tepat kalau ditangani oleh koperasi; atau memang beberapa komoditas dibiarkan saja berkembang menurut kekuatan pasar yang mungkin sekali akan lebih efisien. Tetapi suatu hal yang harus dipegang adalah bahwa, baik mitra maupun koperasi jangan menangani atau mengembangkan usaha yang menjadi pesaing usaha transmigran, tetapi usaha yang dikembangkan tersebut harus usaha atau kegiatan yang sangat mendukung atau sangat dibutuhkan transmigran namun transmigran sendiri tidak dapat melakukannya. Kegiatan pendukung yang sangat dibutuhkan transmigran adalah kegiatan yang secara nyata dapat meningkatkan produktivitas mereka atau meningkatkan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan.

Beberapa komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet dan lain-lain cenderung lebih sesuai apabila ditangani lewat kemitraan. Dalam hal ini, usaha besar sebagai mitra transmigran dapat menangani kegiatan di hilir (pengolahan kelapa sawit dan karet serta pemasarannya). Beberapa komoditas pangan dan ternak bisa ditangani atau perlu ditangani koperasi agar jaringan kegiatan agribisnisnya lebih efisien dan menguntungkan bagi transmigran. Tetapi di antara komoditas-komoditas pangan dan ternak tersebut lebih bijaksana apabila jaringan agribisnisnya dibiarkan berkembang sendiri. Dalam hal ini, sangat diperlukan pemahaman (melalui kajian-kajian) yang sesuai tentang komoditas yang perlu ditangani lewat kemitraan, komoditas yang sangat membutuhkan koperasi, dan komoditas yang dapat dibiarkan berkembang sendiri.

Secara khusus mengenai koperasi agribisnis di daerah transmigrasi (dalam hal ini adalah KUD), dengan pemikiran tersebut di atas, perlu dipikirkan dan ditemukan komoditas basis atau unggulan yang akan ditangani lewat kegiatan KUD tersebut. Dengan pemikiran perwilayahan agribisnis, perlu pula dikaji dan dipikirkan, apakah dengan pola satu SP satu KUD secara ekonomis dan finansial logis dan dapat dioperasionalkan? Hal ini perlu menjadi pertimbangan juga dalam mempekerjakan TKPMP di daerah transmigrasi.

Pendahuluan

Sektor agribisnis merupakan sektor ekonomi terbesar dan terpenting dalam perekonomian nasional. Sekitar 55,6 persen (US\$ 25,3 miliar) total nilai ekspor nasional tahun 1995 berasal dari ekspor produk-produk agribisnis. Peran terpenting sektor agribisnis saat ini adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan menghidupi sebagian besar rakyat kita. Saat ini, sektor agribisnis menyerap sekitar 60 persen angkatan kerja nasional, termasuk di dalamnya 21,3 juta unit usaha kecil berupa usaha rumah tangga pertanian. Bila seluruh anggota keluarga diperhitungkan, maka sekitar 80 persen jumlah penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor agribisnis.

Peranan sektor agribisnis yang demikian besar dalam perekonomian nasional memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Cara yang paling efektif untuk memberdayakan ekonomi rakyat sekaligus mendorong peningkatan ekspor adalah melalui percepatan pembangunan sektor agribisnis. Kemudian, untuk melakukan percepatan pembangunan agribisnis diperlukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) agribisnis, selain faktor lainnya. Jumlah angkatan kerja yang besar pada sektor agribisnis mengharuskan kita untuk memberi prioritas utama pada pembinaan SDM agribisnis dalam program-program pembinaan SDM nasional.

Dilihat dari peranannya dalam pembangunan sektor agribisnis, SDM agribisnis dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan besar yaitu: pertama, SDM yang berperan sebagai aktor utama pembangunan agribisnis. Termasuk ke dalam golongan ini adalah SDM yang bekerja pada: subsistem agribisnis hulu, agribisnis usahatani dan pada subsistem agribisnis hilir. Kedua, SDM yang berperan sebagai aktor pendukung, yaitu SDM yang bekerja pada lembaga penyedia jasa bagi pembangunan sektor agribisnis. Termasuk ke dalam golongan ini adalah SDM yang bekerja di lembaga pemerintahan, perbankan, konsultan, penelitian dan pengembangan dan lain-lain. Sesuai dengan perannya dalam agribisnis, masing-masing golongan SDM tersebut memerlukan pembinaan mutu tersendiri.

Pembinaan SDM memiliki dimensi luas. Keunikan faktor produksi SDM ini, dimana kemampuan kerja seorang tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dengan pribadinya, maka pembinaan SDM dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui pendidikan, perbaikan kesehatan dan perbaikan nutrisi. Dalam makalah ini, pembinaan SDM agribisnis dibatasi pada sisi pendidikan/ pengetahuan saja.

Karakteristik Agribisnis dan Tuntutan Kualitas SDM

Sektor agribisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor ekonomi lain, sehingga menuntut kualitas tenaga kerja tersendiri pula, yang tidak cukup dinilai hanya berdasarkan pendidikan formal yang diperoleh.

Karakteristik suatu agribisnis yang berkaitan dengan tuntutan kualitas SDM adalah: pertama, produk akhir yang dihasilkan suatu agribisnis komoditi merupakan hasil suatu tahapan-tahapan produksi produk antara yang berbasis pada proses produksi dan produk biologis. Artinya, setiap SDM agribisnis yang berada pada suatu agribisnis harus sadar betul bahwa proses produksi dan produk yang ditanganinya adalah produk biologis, yang sangat sensitif terhadap perubahan waktu dan iklim; dan agribisnis tidak mungkin berhasil kalau hanya menangani ini satu tahap proses produksi saja.

Kedua, antartahapan proses produksi (dari hulu ke hilir) mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi, terutama dari segi mutu produk. Mutu produk akhir suatu agribisnis sangat ditentukan oleh *genetic make up* bibit/ benih (sebagai *blue print*) yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hulu (industri pembibitan). Ketiga, kinerja akhir suatu agribisnis ditentukan oleh konfegensi berbagai aspek seperti teknologi, sosial-budaya dan kelembagaan, politik (kebijakan) dan lain-lain, mulai dari subsistem agribisnis hulu sampai subsistem agribisnis hilir dan subsistem penyedia jasa.

Karakteristik agribisnis di atas menuntut pengelolaan agribisnis yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari hulu ke hilir. Pengembangan dan pengusaha agribisnis tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong (misalnya *on-farm* atau agroindustri saja), tetapi harus dilakukan secara utuh. Keutuhan yang dimaksud bukan sekedar melihat subsistem-subsistem agribisnis yang terpisah sebagai satu sistem, tetapi pengelolaannya, bahkan pengusahaannya, harus menjadi satu sistem.

Karakteristik agribisnis yang menghendaki pengelolaan secara integrasi vertikal menuntut kualitas yang baik SDM agribisnis. Kinerja akhir dari suatu

agribisnis ditentukan oleh kerjasama tim yang harmonis mulai dari hulu ke hilir. Hal ini berarti SDM yang bekerja pada level manajemen paling bawah (*bottom level management*) tidak cukup hanya memiliki orientasi pekerjaannya semata (*on-the job oriented*), tetapi juga harus memiliki wawasan tentang pekerjaan yang lain; wawasan tentang departemennya, wawasan tentang perusahaannya (*micro behaviour*) bahkan wawasan yang cukup tentang industri (*macro behaviour*). Dengan demikian, setiap SDM yang berada pada *job* yang berbeda dapat menghargai (*appreciate*) pekerjaan yang lain dan mampu melihat konsekuensi dari kinerja-kinerjanya terhadap kinerja *job* yang lain dan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Pada level yang lebih luas, SDM yang bekerja pada suatu subsistem agribisnis harus memiliki wawasan tentang subsistem lain (termasuk jasa penunjang). Dengan demikian, kinerja setiap subsistem pada aliran produk tertentu dapat secara harmonis dan konvergen menyumbang pada kinerja akhir suatu sistem agribisnis.

Pembinaan SDM Agribisnis

SDM agribisnis selama ini berasal dari SDM dengan latar belakang pendidikan/pengalaman yang berbeda, sesuai dengan *job* yang ada. SDM agribisnis terdiri dari yang berpendidikan SLTA ke bawah sampai tingkat pendidikan S2/S3; dari yang berlatarbelakang pendidikan pertanian sampai dengan yang bukan pertanian.

Variasi latar belakang pendidikan/pengalaman SDM agribisnis sering menimbulkan kesalahpahaman antar SDM dalam perusahaan agribisnis, sehingga kerjasama tim yang harmonis tidak dapat diwujudkan. Tidak jarang pula terjadi bahwa masalah inefisiensi dan kelambatan perkembangan perusahaan agribisnis bersumber dari tidak harmonisnya SDM yang ada. Biasanya, perusahaan-perusahaan agribisnis dan departemen teknis melaksanakan pelatihan *on-job* bagi karyawannya baik pada awal perekrutan maupun secara periodik dalam rangka promosi jabatan. Hal ini sangat penting mengingat latar belakang pendidikan formal atau pengalaman yang beragam tidak selalu *match* dengan kualifikasi SDM yang dibutuhkan, sehingga diperlukan *on-the job training* untuk memperbaiki *on-the job skills*.

Namun demikian, mengandalkan *on-the job training* saja ternyata tidak cukup untuk memenuhi kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk perusahaan agribisnis. Pengalaman berbagai negara yang telah maju agribisnisnya, misalnya Amerika Serikat, mengungkapkan bahwa keterbatasan *on-the job training*

Pembinaan Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Ekonomi Perdesaan

adalah tenaga kerja pada unit kegiatan atau departemen tidak memahami apa yang dikerjakan oleh tenaga kerja pada unit kegiatan atau departemen lain, sehingga kerjasama tim tidak berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi keterbatasan *on-the job training* tersebut, di negara sudah maju agribisnisnya seperti Amerika Serikat, sedang mengembangkan dan melaksanakan suatu model simulasi pembinaan SDM agribisnis yang bersifat *cross-training* (Koontz *et al.* 1995). Esensi dari *cross-training* ini adalah membina setiap SDM agribisnis *how to do each other's job*, melalui simulasi *on-the job cross-training exercise*.

Hasil pembinaan SDM agribisnis dengan model *cross-training* ternyata mampu meningkatkan kemampuan SDM secara signifikan dalam wawasan: posisi setiap kerja dalam perusahaan; posisi perusahaan dalam industri; pemahaman kondisi makro (*macro behaviour*); psikologi dan dinamika pasar; kemampuan pengambilan keputusan secara kerjasama tim; kemampuan memahami dan menghargai posisi pekerja lain, baik dalam satu perusahaan maupun perusahaan yang berbeda dan meninkarkan pemahaman keterkaitan proses dalam suatu aliran produk tertentu (Koontz *et al.* 1995; Hill *et al.* 1996).

Barangkali, untuk membina SDM agribisnis yang masih cenderung terkotak-korak, kita perlu mengembangkan model-model pembinaan yang bersifat *cross-training* disamping *on-the job training* yang telah ada.

Pembinaan SDM dan Pengembangan Perekonomian Perdesaan

Dalam upaya pembangunan perekonomian perdesaan di Indonesia saat ini, pengembangan agribisnis merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) agar "kue" yang besar dari hasil pembangunan agribisnis dapat dinikmati secara nyata dan memadai oleh masyarakat perdesaan. Salah satu mekanisme yang dapat diandalkan agar manfaat pembangunan agribisnis dapat dinikmati oleh masyarakat perdesaan adalah mengembangkan organisasi bisnis petani berupa pengembangan kopcrasi agribisnis. Melalui pengembangan koperasi agribisnis beserta pengembangan jaringan bisnisnya, petani yang berada pada agribisnis usahatani dapat mengembangkan unit-unit usaha, baik pada agribisnis hulu maupun pada agribisnis hilir untuk merebut nilai tambah (*added value*) yang ada. Dengan demikian, manfaat yang ditimbulkan oleh pengembangan agribisnis, seperti manfaat kemajuan teknologi, peningkatan permintaan dan lain-lain dapat dinikmati oleh masyarakat petani perdesaan.

Dalam upaya mendorong pengembangan koperasi agribisnis ini kita memerlukan reorientasi pembinaan SDM petani maupun SDM agribisnis yang lain seperti penyuluh pertanian dan SDM yang berada pada departemen teknis.

Pembinaan SDM petani di masa lalu masih cenderung terbatas pada peningkatan kemampuan agroteknik. Pembinaan kemampuan bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis petani kita hampir tidak pernah dilakukan. Akibatnya, organisasi bisnis petani sulit (tidak) berkembang sehingga manfaat dari pembangunan agribisnis sangat sedikit dinikmati petani.

Di masa yang akan datang, pembinaan SDM petani perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam aspek bisnis, manajerial, organisasi bisnis dan peningkatan wawasan agribisnis sehingga petani kita mampu membangun organisasi bisnisnya seperti koperasi agribisnis.

Perubahan kebutuhan SDM petani yang demikian, tentu saja memerlukan reorientasi peran penyuluhan pertanian yang secara tradisional merupakan lembaga pembinaan SDM petani. Bila di masa lalu cakupan penyuluhan pertanian hanya pada aspek agroteknis, maka yang diperlukan selanjutnya adalah penyuluhan dan pembinaan aspek bisnis, manajerial dan organisasi bisnis SDM petani. Tentu saja, dengan pendidikan para penyuluh pertanian kita yang hanya SLTA/Akademi saja, tidak dapat diandalkan lagi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan penyuluh perlu dilakukan, baik melalui pendidikan formal yang lebih tinggi maupun melalui kursus singkat (*short-course*), studi perbandingan ke negara yang maju agribisnisnya dan lain-lain. Dengan demikian, fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang selama ini hanya sebagai lembaga penyuluhan agroteknis, dapat lebih berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis.

Reorientasi pembinaan SDM di tingkat perdesaan tersebut memerlukan reorientasi pembinaan SDM di departemen teknis yang melayani kawasan perdesaan. SDM Departemen Pertanian mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, perlu memiliki wawasan agribisnis yang luas, bukan hanya *micro behaviour* atau *macro behaviour*, tetapi juga *global behaviour* dari agribisnis. Hal ini dibutuhkan agar kebijaksanaan yang ditujukan pada pembangunan ekonomi perdesaan benar-benar mendorong pembangunan perdesaan. Untuk memiliki kemampuan seperti itu, pembinaan SDM birokrat tidak cukup mengandalkan *on-the job training* yang hanya membina SDM bagaimana menjadi birokrat tetapi juga memerlukan semacam *cross-training*. Hanya birokrat yang memiliki pengalaman belajar menjadi petanilah yang

Pembinaan Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis dan Ekonomi Perdesaan

mampu menghasilkan kebijaksanaan yang integratif dan memberi iklim yang kondusif bagi perkembangan agribisnis.

Catatan Penutup

Untuk memberdayakan ekonomi rakyat termasuk pembangunan ekonomi perdesaan, percepatan pembangunan sektor agribisnis merupakan satu-satunya pilihan bagi kita saat ini. Percepatan pembangunan agribisnis tidak akan mungkin bila tidak didukung oleh SDM yang memadai. Oleh sebab itu, pembinaan SDM agribisnis yang mencakup sekitar 60 persen angkatan kerja nasional, hendaknya menjadi prioritas utama dalam strategi dan kebijakan pembinaan SDM nasional.

Dalam upaya mendukung pembinaan SDM agribisnis, perguruan tinggi perlu mengembangkan model-model simulasi pembinaan SDM yang bersifat *cross-training*, yang dapat digunakan untuk pembinaan SDM agribisnis baik, yang berada pada birokrasi, perusahaan maupun petani.